



PERANAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

KEBIJAKSANAAN PERTANIAN

Pentingnya peran pemerintah di dalam pembangunan pertanian karena di dalam kenyataan persaingan bebas yang sempurna itu tidak ada, dimana ada unsur-unsur kekuatan ekonomi yang mempengaruhi dan memberi corak khusus pada bekerjanya gaya-gaya pasar. **Salah satu kekuatan itu adalah pemerintah**



Kebijaksanaan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan umum tertentu, yaitu meningkatkan kehidupan petani dan kesejahteraan yang lebih sempurna.



Contoh produk
kebijaksanaan pemerintah :
**Undang-undang, Peraturan
pemerintah, Keputusan
presiden, Keputusan menteri,
keputusan Gubernur dll.**

Sifat kebijaksanaan :

1. Pengatur (*regulating policies*) :

rayoneering dlm distribusi pupuk

2. Pemerataan pendapatan (*distributive*

policies) : penentuan harga minimum beras

dimaksudkan untuk melindungi petani dan

menstabilkan pendapatan. Sedangkan


penentuan harga maksimum adalah untuk

melindungi konsumen (kalau harga naik


lebih tinggi dari harga maksimum, maka

pemerintah mengeluarkan stocknya) ke

pasar.




Tinggi rendahnya harga minimum dan maksimum mempunyai pengaruh pada bagian yang diterima oleh setiap pihak termasuk distributor dan pabrik-pabrik penggilingan padi



Kebijaksanaan pertanian yang lebih spesifik meliputi berbagai bidang penting seperti kebijakan harga, kebijakan pemasaran, dan kebijakan structural, dan bidang-bidang khusus pengaturan-pengaturan kelembagaan baik di dalam maupun diluar sector pertanian

Kebijaksanaan Harga


Kebijaksanaan harga biasanya digabung dengan kebijaksanaan pendapatan sehingga disebut *Price and income policy*. Dari segi harga kebijaksanaan itu bertujuan untuk mengadakan stabilisasi harga, sedang dari sisi pendapatan bertujuan agar pendapatan petani tidak terlalu berfluktuasi dari musim ke musim.




Kebijaksanaan harga dapat mengandung pemberian suatu penyangga (*support*) atas harga2 hasil pertanian atau langsung mengandung sejumlah subsidi tertentu bagi petani.

Tujuan Kebijakan Harga secara Teoritis :

1. Stabilisasi harga hasil2 pertanian terutama pada tingkat petani
2. Meningkatkan pendapatan petani melalui perbaikan dasar tukar (term of trade)
3. Memberikan arah dan petunjuk pada jumlah produksi




Kebijaksanaan Pemasaran
Ditekankan pada perubahan
mata rantai pemasaran dari
produsen ke konsumen, dengan
tujuan utama untuk memperkuat
daya saing petani.




Di Negara kita dibentuk sindikat dan PT eksportir kopi, Badan Pengurusan Kopra, Badan Pengurusan Lada dll yang ditujukan untuk mengurangi pengaruh fluktuasi harga pasar dunia atas penghasilan petani.


Pada pasaran Internasional, Badan Pengurus kopra (BPK) berusaha menghilangkan persaingan yang tidak sehat diantara eksportir kopra Indonesia, dengan kebijaksanaan kredit lunak yang diberikan kepada eksportir yang lemah, dan menjamin pengembalian dana-dana yang dipungut dari hasil kopra ke daerah yg bersangkutan untuk merehabilitasi kebun2 kopra




Masalah yang dihadapi di Negara kita kurangnya kegairahan untuk memproduksi pada tingkat petani, karena prosentase harga yang diterima oleh petani relative rendah dibandingkan dengan bagian yang diterima golongan2 lain.



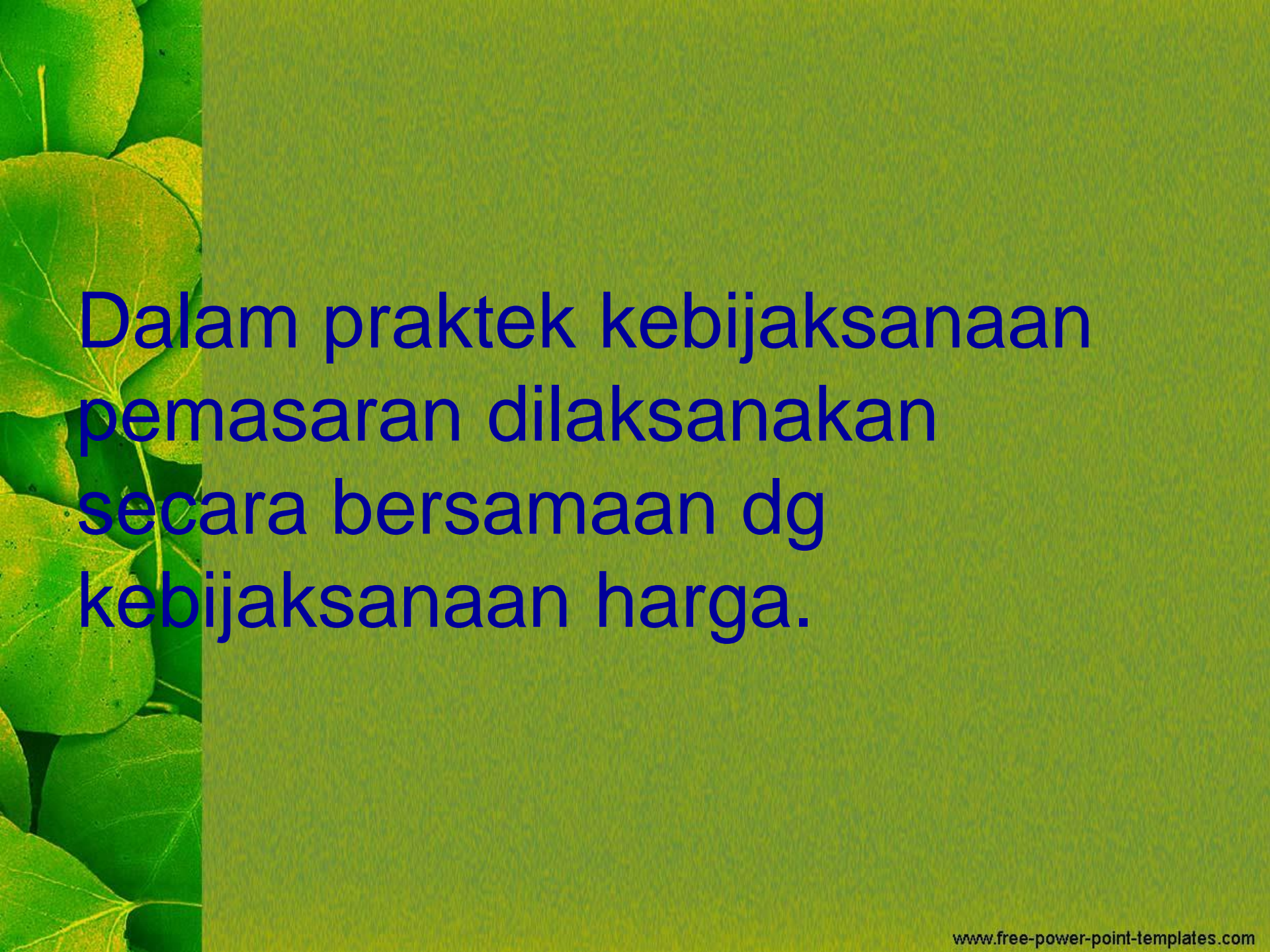
Disamping kebijaksanaan pemasaran hasil-hasil tanaman perdagangan untuk ekspor, kebijaksanaan ini meliputi pula pengaturan distribusi sarana2 produksi bagi petani.



Pemerintah berusaha menciptakan persaingan yang sehat di antara para pedagang dengan melayani kebutuhan petani seperti pupuk, insektisida, pestisida, dll shg petani dapat membeli sarana2 produksi tersebut dengan harga yang tidak terlalu tinggi.




Jadi kebijaksanaan pemasaran merupakan usaha campur tangan pemerintah dalam bekerjanya kekuatan2 pasar. Di satu pihak pemerintah dapat mengurangi pengaruh kekuatan2 pasar supaya tidak terlalu merugikan para pedagang dan petani, tetapi di pihak lain persaingan dapat didorong untuk mencapai efisiensi ekonomi yang tinggi.




Dalam praktek kebijaksanaan pemasaran dilaksanakan secara bersamaan dg kebijaksanaan harga.

Kebijaksanaan Struktural

Dimaksudkan untuk memperbaiki struktur produksi misalnya luas pemilikan tanah, pengenalan dan pengusahaan alat2 pertanian yang baru dan perbaikan prasarana pertanian pada umumnya baik prasarana fisik maupun social ekonomi.



Kebijaksanaan structural ini hanya dapat terlaksana dengan kerjasama yang erat dari beberapa lembaga pemerintah



Dalam pelaksanaannya kebijakan harga, pemasaran dan structural tidak dapat dipisahkan dan ketiganya saling melengkapi.


KEBIJAKSANAAN PERTANIAN DAN INDUSTRI

Salah satu tujuan kebijaksanaan harga hasil pertanian adalah untuk mengusahakan perimbangan antara pendapatan sector pertanian dan pendapatan di luar sector pertanian termasuk sector industri. Perimbangan ini selalu sulit dipertahankan karena perbedaan struktur pertanian dan struktur industri


Ciri2 pokok perbedaan antara pertanian dan industri, yang menyebabkan kebijaksanaan yang diperlukan juga harus berbeda adalah :

1. Produksi pertanian sangat kurang pasti dsn risikonya besar karena tergantung pada alam yang kebanyakan di luar kekuasaan manusia untuk mengontrolnya, sedangkan industri tidak demikian.
2. Pertanian memproduksi bahan2 makanan pokok dan bahan2 mentah yang dengan kemajuan ekonomi dan kenaikan tingkat kesejahteraan manusia permintaannya tidak akan naik seperti permintaan atas barang2 industri.


Pertanian adalah bidang usaha yang tidak hanya faktor2 ekonomi saja yang menentukan tetapi juga faktor2 sosiologi, kebiasaan dll memegang peranan penting. Industri lebih bersifat lugas.




Ketiga cirri khusus pertanian ini nampak dalam teori ekonomi sebagai perbedaan dalam respon permintaan dan penawaran atas perubahan2 harga.



Elastisitas harga atas permintaan dan penawaran hasil2 pertanian jauh lebih kecil dari pada hasil2 industri.



Pendapatan sector industri pada umumnya lebih tinggi dari pada sector pertanian, maka elastisitas pendapatan atas permintaan barang2 hasil industri lebih besar dari pada atas bahan makanan pokok.




Perbedaan pendapatan antara penduduk kota dan desa yang sedemikian rupa membawa akibat dalam pola pengeluaran konsumsi dan perilaku ekonomi lainnya.


Ada 3 hal yang menyebabkan rata2 pendapatan penduduk kota lebih tinggi, yaitu :

1. Kestabilan dan kemantapan yang lebih besar dari pendapatan penduduk kota.
2. Lebih banyaknya lembaga2 ekonomi dan keuangan yang dapat mendorong kegiatan ekonomi di kota


Lebih banyaknya fasilitas pendidikan dan kesehatan di kota yang memungkinkan produktivitas tenaga kerja di kota lebih tinggi




Salah satu cara untuk mengurangi perbedaan pendapatan ini adalah dengan menambah persediaan modal di desa serta mengurangi jumlah tenaga kerja di pedesaan dan diserap bagi lapangan industri di kota2.

- 
1. Adanya tambahan modal berupa mesin2 traktor pada petani
 2. adanya keahlian dan ketrampilan yang diperlukan oleh petani untuk menjalankan mesin2 traktor


Kedua unsur ini yang dapat menimbulkan perbedaan produktivitas tenaga kerja, sehingga mempersempit *gapp* pendapatan antara desa dan kota.



Sebenarnya membandingkan tingkat kualitas hidup di kota dan desa dengan ukuran pendapatan uang tidak terlalu tepat, karena penelitian² sosial antropologis dan daya beli rupiah yang lebih besar di desa dibanding kota, menunjukkan kebahagiaan yang mungkin lebih besar pada penduduk desa.




Namun demikian yang pasti diperlukan kebijaksanaan yang berbeda antara kota atau industri dan desa atau pertanian.




Dari segi pasar mudah dilihat bahwa sector pertanian memerlukan menjual hasil-hasilnya ke sector industri dan sector industri menjual hasil-hasilnya pada sector pertanian.

Kebijaksanaan Pembangunan Desa

Persoalan pembangunan desa tidak hanya menjadi perhatian para ahli ekonomi pertanian saja, tetapi sejak lama menjadi bahan penelitian ahli pertanian, ahli antropologi, ahli geografi dan demografi, ahli sosiologi, ahli pendidikan dll.




Sebelum Repelita tahun 1969 ahli2 ekonomi dan mahasiswaanya hanya menekankan pada soal2 makro ekonomi dan soal2 ekonomi perusahaan2 besar, persoalan ekonomi petani2 kecil dianggap lebih banyak termasuk soal social dan budaya.




Di negara2 Eropa & Amerika usaha tani mempunyai pembukuan yang jelas yang terpisah dari usaha tani. Perhitungan untung rugi diadakan dengan jelas pada tiap akhir tahun, sehingga dapat dihitung hasil bersih untuk tanah, modal, dan tenaga kerja sbg faktor2 produksi utama dalam pertanian.

Pada awal2 Repelita masalah pembangunan desa muncul menjadi masalah ekonomi pertanian, yang mengkaitkan antara panca usaha dan peningkatan produksi melalui system Bimas, hasil2 panca usaha adalah hasil2 teknis yang belum tentu memberikan pendapatan yang merata bagi seluruh masyarakat desa dalam hubungan perdagangan dengan pihak luar desa yang lebih kuat.




Keberhasilan panca usaha tergantung pada terpeliharanya saluran2 irigasi, jalan2, jembatan2 desa yang pada umumnya menjadi tanggung jawab desa secara keseluruhan.

Di sinilah terletak hubungan yan sangat erat antara ekonomi petani kecil2 secara individual dg pembangunan pertanian dan pembangunan desa.



Kini persoalan pembangunan desa dan pembangunan ekonomi desa diakui secara nyata oleh pemerintah. Desa dianggap sebagai satu unit ekonomi yang operasional. Pemerintah memberikan subsidi berupa uang tunai untuk kepentingan desa sendiri yang terus dinaikkan tiap tahun.




Prinsip2 ekonomi yang dipakai dalam kebijaksanaan pemberian subsidi adalah prinsip pompa, sekali air hasil pemompaan sudah mengalir dengan teratur maka subsidi tersebut dapat dihentikan untuk digunakan di sector lain yang lebih produktif seperti pembangunan kredit desa melalui bank desa, disinilah peran desa tidak kecil sebagai lembaga pemerintahan.

PERENCANAAN PERTANIAN

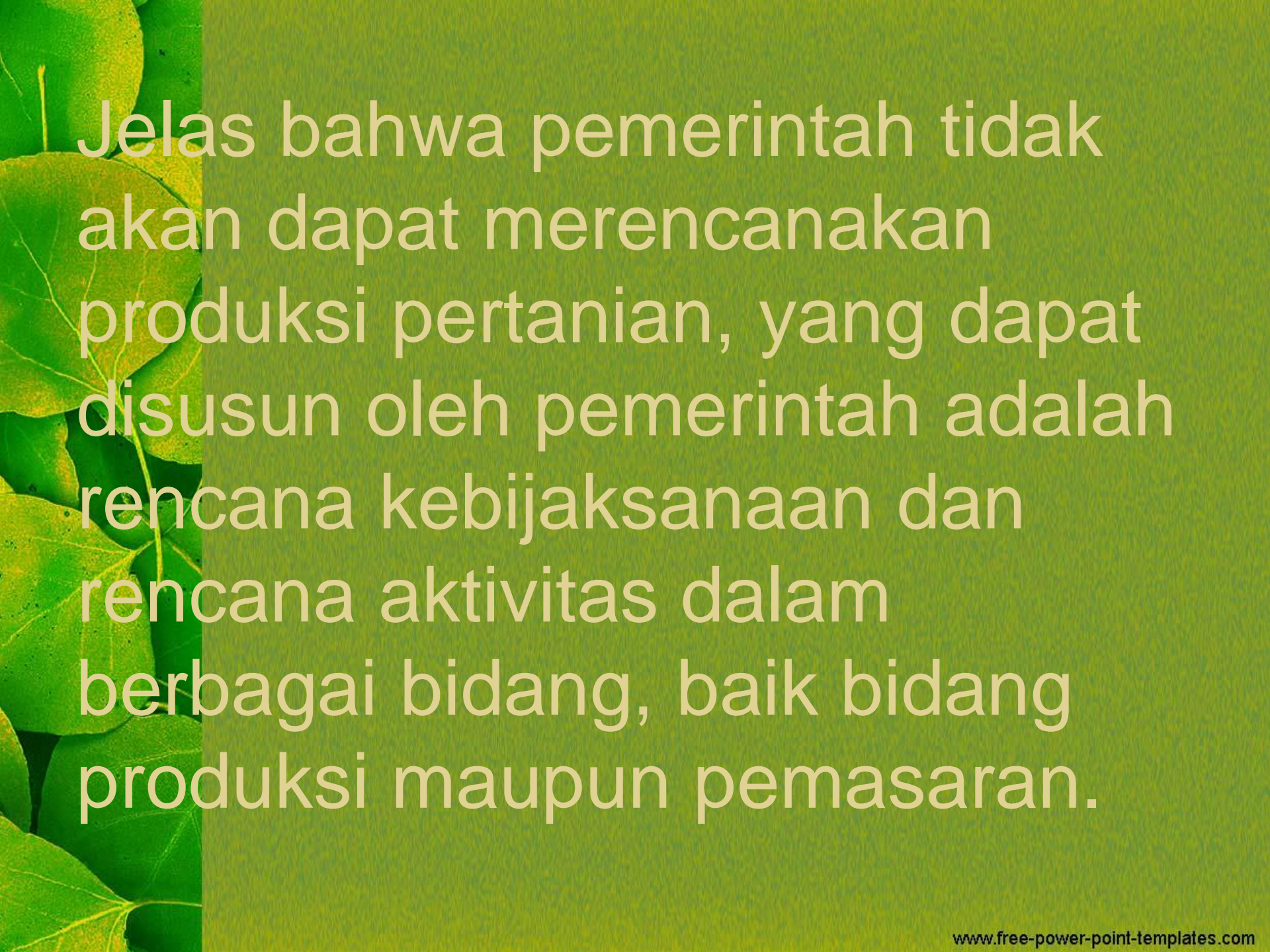
Pemerintah mempunyai keperluan pembangunan yang tidak terbatas dengan sumber2 dana yang tersedia terbatas. Maka perencanaan berarti proses pengambilan keputusan untuk memilih kebijaksanaan dan program yang perlu didahulukan pengerjaannya. Penentuan dan pemilihan inilah yang merupakan cirri khusus perencanaan.

Rencana Kebijakan Produksi


Merencanakan pertanian jauh lebih sulit dibanding merencanakan pembangunan industri, hal ini karena usaha tani menyangkut petani yang jumlahnya jutaan dan kecil2 dg perilaku ekonomi yg berbeda-beda



Naiknya produksi tidaklah penting bagi petani, yang lebih penting adalah naiknya pendapatan yaitu hasil produksi dikalikan harga penjualan di pasar. Kalau petani memperkirakan bahwa harga jagung akan turun maka mereka tidak lagi akan menanam walaupun pemerintah menganjurkan peningkatan produksi jagung.



Jelas bahwa pemerintah tidak akan dapat merencanakan produksi pertanian, yang dapat disusun oleh pemerintah adalah rencana kebijaksanaan dan rencana aktivitas dalam berbagai bidang, baik bidang produksi maupun pemasaran.




Untuk mendorong petani meningkatkan produksi, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan yang sifatnya merangsang, misalnya kebijaksanaan harga minimum atas beras atau memberi subsidi pada harga pupuk. Juga melalui PUTL pemerintah mengadakan investasi untuk pembangunan jalan2 ekonomi, jembatan2 dan dam2 serta saluran irigasi.




Perencanaan Nasional dan Kondisi Daerah

Banyak kemungkinan melesetnya antara rencana dan realisasi, karena kurang cocoknya rencana yang disusun pada tingkat nasional dengan kondisi yang nyata pada tingkat daerah.



Dapat pula dikatakan bahwa logika kebijaksanaan pemerintah sering tidak cocok dengan logika petani. Untuk dapat menerapkan rencana2 yang dibuat di tingkat nasional diperlukan rencana2 komplementer pada tingkat daerah.



Daerah yang potensi pembangunannya besar akan segera nampak dari respons yang diberikan pada program2 pembangunan nasional.